

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI



**Oleh:
Yuninda Oktika
140810149**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Yuninda Oktika
140810149**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dalam naskah sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 17 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

Yuninda Oktika
140810149

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Oleh

Yuninda Oktika

140810149

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Akuntansi**

Telah Disetujui Pembimbing Pada Tanggal

Batam, 19 Maret 2017

Dairi Sapta Rindu Simanjuntak, S.Pd.,M.Si

Pembimbing

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaan nirrahim

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau".

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi.
3. Bapak Dairi Sapta Rindu Simanjuntak, S.Pd., M.Si selaku pembimbing skripsi yang begitu telaten dan sabar dalam membimbing saya, memberikan pengarahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini, serta sudah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan ilmu, bimbingan, nasihat serta saran dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Seluruh bapak/ibu dosen Program Studi Akuntansi, Bapak/Ibu Dosen Universitas Putera Batam yang telah mencurahkan ilmunya serta seluruh karyawan Universitas Putera Batam.
5. Petugas perpustakaan UPB dan seluruh staf pajak bidang pajak daerah DISPENDA KEPRI, terima kasih atas bantuannya.

6. Kepada orang tua saya tercinta, yang senantiasa mendoakan setiap langkah yang saya tempuh, mama saya yang selalu memberikan kekuatan untuk saya agar terus melangkah maju, dan abak yang memberikan dorongan dan nasihat kepada saya. Terima kasih atas doa yang tiada henti-hentinya dipanjatkan.
7. Untuk kakak saya Yunda Nelvy dan teman saya Yuliani, yang selalu memberikan semangat.
8. Teman-teman seperjuangan saya Novita Pramudita, Luci Rupedi, Melda Yuliza dan teman-teman yang ada di Program Studi Akuntansi.
9. Mungkin saya tidak dapat menuliskan semua nama teman-teman disini, tapi saya selalu menulis nama kalian didalam lubuk hati saya. Serta untuk semua teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungannya. Terima kasih atas semangat dan dukungannya.

Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Wassalmu'alaikum wr.wb.

Batam, 17 Februari 2017

Yuninda Oktika

ABSTRAK

Pembangunan dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya memerlukan perhatian khusus, baik dari pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan dan memenuhi pembiayaan pemerintah. Selain dibiayai oleh pemerintah pusat, pembangunan suatu daerah juga sangat ditentukan oleh sumber pendapatan daerah tersebut. Sumber-sumber Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah khususnya penerimaan PKB dan BBNKB berperan penting terhadap pertumbuhan penerimaan daerah, karena setiap tahun terjadi peningkatan yang begitu pesat terhadap penggunaannya. Oleh karena itu, Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tentang kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis kontribusi, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linear berganda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan runtun waktu (*time series*) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kepulauan Riau, dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*, yang terdiri dari 72 data realisasi PKB, BBNKB, dan PAD. Hasil penelitian ini bahwa Terdapat kontribusi yang signifikan antara PKB dan BBNKB secara bersama-sama terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010-2015. Secara parsial, Terdapat kontribusi yang signifikan antara PKB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan analisis kontribusi PKB terhadap BBNKB mengalami tren yang fluktuatif, meskipun realisasi PKB selalu meningkat namun kontribusinya terhadap PAD mengalami penurunan, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 32,65 persen dan terendah 27,24 persen pada tahun 2014. Terdapat kontribusi yang signifikan antara BBNKB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan analisis kontribusi BBNKB terhadap PAD mengalami tren yang fluktuatif, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 35,97 persen dan kontribusi terendah sebesar 27,65 persen terjadi pada tahun 2015.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Development today covering all fields and of course need special attention, from government in particular and public in general. In the regional autonomy now, the government the region needs a significant amount of funds to finance the construction of and meet state funds. Besides funded by the central government, development of area also be very much determined by a source of Regional Revenue The. Income Sources Areas, Namely Local Revenue Consisting from Local Taxes, Retribution, The Results of Local Resources Management Separated, and Local Revenue as Legitimate. Local taxes especially from motor vehicle tax and vehicle title transfer tax play an important role on the growth of regional income, because each year been an increase in who was so advanced to the user. Hence , this research was intended to analyze about contribution motor vehicle tax and vehicle title transfer tax ownership transfer on local revenue provincial riau islands .The method of analysis that used namely descriptive analysis , analysis contribution , test the assumption classical , the hypothesis and analysis linear regression multiple .The kind of data that used in this research was secondary data that uses time series obtained from department of local revenue riau islands , to technique the sample collection that is purposive sampling , consisting of 72 data the realization motor vehicle tax , vehicle title transfer tax , and local revenue .The result of this research that there is a significant contribution between motor vehicle tax and vehicle title transfer tax together to local revenue provincial riau islands in the year 2010 to 2015 .In partial , there is a significant contribution between motor vehicle tax to local revenue provincial riau islands . Based on analysis of the contribution motor vehicle tax to vehicle title transfer tax had been fluctuating trend , although the motor vehicle tax is increasing but contribution to local revenue decline , the largest contribution happened in the year 2010 as much as 32,65 percent and lowest 27,24 percent in 2014 .There is a significant contribution between vehicle title transfer tax to local revenue provincial riau islands .Based on analysis of the contribution vehicle title transfer tax to local revenue had been fluctuating trend , the largest contribution happened in the year 2013 of 35,97 percent and contribution lowest of 27,65 percents increase in 2015 .

Password: motor vehicle tax , vehicle title transfer tax, local revenue

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan pembangunan nasional pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber- sumber daya yang dimilikinya. Sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Otonomi daerah telah membawa banyak perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, jika dahulu daerah bersifat pasif maka sekarang mereka dituntut untuk aktif dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Dalam otonomi dewasa ini, sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Oleh karena itu, daerah berlomba-lomba meningkatkan sumber pendapatannya dengan mengenakan berbagai pajak yang memang menjadi kewenangannya.

Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (untuk selanjutnya disingkat menjadi PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran PAD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan. Sedangkan pajak daerah merupakan faktor penentu tingkat PAD. Apabila PAD meningkat dari tahun ke tahun, maka akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana transfer dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas pembangunan daerah mereka.

Melihat struktur pendapatan daerah saat ini, sumber pendapatan Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh dana perimbangan dari pusat.

Ketergantungan daerah akan dana transfer dari pusat masih sangat tinggi, untuk itu optimalisasi PAD diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memecah ketergantungan akan dana transfer. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Dari keempat sumber PAD tersebut, Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran daerah dalam membiayai pengeluaran daerah baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan daerah yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang –Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah Tingkat I yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetapannya seragam

diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing.

Jenis pajak daerah tingkat I yang besar pengaruhnya terhadap pemasukankas daerah dan memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dari standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor (untuk selanjutnya disingkat menjadi PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (untuk selanjutnya disingkat menjadi BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Pada saat ini perkembangan objek BBNKB terus mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh semakin banyaknya minat masyarakat untuk membeli kendaraan bekas. BBNKB merupakan pajak yang sumbangannya relatif potensial terhadap penerimaan PAD, maka pajak yang potensial tersebut harus terus digali,

untuk meningkatkan sumbangan penerimaan pajak untuk pembiayaan dan pembangunan daerah.

Pengenaan PKB dan BBNKB dewasa ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3 sampai 15. Penerapan PKB pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi dimaksud.

Keterkaitan antara jumlah penduduk, jumlah obyek kendaraan bermotor dan PAD menjadikan salah satu yang saling mempengaruhi. Semakin besar potensi dan realisasi PKB maka akan semakin besar pula mempengaruhi jumlah penerimaan PAD, tidak terkecuali Kepulauan Riau. Kepulauan Riau merupakan provinsi yang terus berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Daya tarik sektor industri di Kepulauan Riau mendorong banyaknya imigran yang masuk yang bertujuan mendapatkan pekerjaan yang menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kepulauan Riau dari tahun 2010 berjumlah 1.692.816 jiwa berkembang menjadi 2.028.169 jiwa ditahun 2016 (Sumber BPS). Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahun, menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Jumlah kendaraan bermotor di

Kepulauan Riau tahun 2010 berjumlah 753.451 unit dan pada tahun 2013 berkembang menjadi 1.068.364 unit (sumber Dishub). Dengan demikian maka adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor ditengah masyarakat akan memberikan dampak bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak khususnya PKB dan BBNKB.

Penelitian tentang kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta (2014) dalam jurnal “Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasipenerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi target dan termasuk dalam kategori yang sangat efektif.

Ratnasari (2016) dalam jurnal “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara” dengan menggunakan metode eksplanatif yang menjelaskan sebab akibat antara variabel terikat dan variabel bebas. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data panel, yang dilaksanakan pada 12 kantor UPTD samsat se- Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian initerdapat pengaruh yang signifikan dari variabel jumlah kendaraan bermotor,

PDRB perkapita, mutasi kendaraan masuk, tunggakan pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat besarnya kontribusi pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, yang pada akhirnya mempengaruhi total pendapatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih tinggi, diperlukan optimalisasi PAD dengan meningkatkan pajak daerah.
- b. Seberapa besar PKB dan BBNKB tersebut akan memberikan kontribusi terhadap PAD.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah penelitian ini agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis hanya membatasi penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya membahas PKB, BBNKB dan PAD
- b. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada tahun 2010 sampai 2015.
- c. Objek penelitian PKB, BBNKB dan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 hingga tahun 2015?
2. Bagaimana kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 hingga tahun 2015?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara bersama-sama terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 hingga tahun 2015?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kontribusi PKB terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 hingga tahun 2015.
2. Menganalisis kontribusi BBNKB terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 hingga tahun 2015.
3. Menganalisis kontribusi PKB dan BBNKB secara bersama-sama terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 hingga tahun 2015.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi Pemerintah dan Pihak Yang Terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Aset Daerah dan instansi yang terkait guna meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam di masa yang akan datang.

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharap dapat memberikan informasi dan menambah wawasan yang membaca hasil penelitian ini.
4. Bagi mahasiswa Universitas Putra Batam, hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan peneliti lain baik mahasiswa UPB sendiri maupun mahasiswa dari kampus lainnya yang ingin mengulas masalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak khususnya di Universitas Putera Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2011:23) mendefinisikan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitri dalam Mardiasmo (2011 : 1) Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tagenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

2.1.2 Fungsi Pajak

Beberapa fungsi pajak yang sering kita dengar adalah fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi reguler (mengatur) yang masing-masing akan dibahas secara lebih rinci dibawah ini.

1. Fungsi Budgetair

Fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber dana bagi negara. Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebesar-besarnya kedalam dalam kas negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat membiayai pengeluaran negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi Reguler

Fungsi regular yang disebut pula sebagai fungsi mengatur/alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

2.1.3 Pembagian Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak. Perbedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Beberapa jenis pajak dapat dilihat menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. Pembagian jenis pajak tersebut sebagai berikut:

1. Pajak Menurut Golongannya

Menurut Golongannya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a) Pajak Langsung :

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada wajib pajak (WP) yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya WP yang bersangkutan

yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh).

b) **Pajak Tidak Langsung :**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN BM). Pajak ini dipungut oleh wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak) terlebih dahulu dan yang memikul pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.

2. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. **Pajak Subjektif**

Pajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh WP adalah PPh.

b. **Pajak Objektif**

Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan PBB.

3. Menurut Lembaga institusi Pemungutan

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu

a. **Pajak pusat** adalah pajak yang diadministrasikan pemerintah pusat dalam hal lain adalah kementerian keuangan yakni DJP, misalnya PPh dan PPN.

- b. Pajak Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

2.1.4 Teori Pemungutan

Terdapat beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.

- 1. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada Negara (penanggung), kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian, seharusnya ada penggantian dari Negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang di bayar tidak ada hubungan langsung.

- a. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (misalnya perlindungan) bagi masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

- b. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau

pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

c. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

d. Teori Asas Daya Beli

Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau Negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

2.1.5 Syarat- Syarat Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar tidak terjadi hambatan dan juga perlawanan dalam pembayaran pajak, antara lain syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu :

- a. Pemungutan pajak harus adil/syarat keadilan, artinya pemungutan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang/syarat yuridis, artinya pajak diatur dalam undang-undang dan memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian/syarat ekonomis, artinya pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.

- d. Pemungutan pajak harus efisien/syarat finansial, sesuai dengan fungsi budgeter, bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Syarat pemungutan pajak harus sederhana, artinya dengan cara pemungutan yang sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; (b) wajib pajak bersifat pasif; dan (c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; (b) wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan (c) fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirinya (a) wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga; (b) pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.7 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak

Adapun teori mengenai tolak ukur dalam menilai pajak daerah ada lima yaitu

1. Hasil (*yield*) dari suatu pajak daerah, apakah sudah memadai hasilnya, dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya juga dari perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut yang dikeluarkan.
2. Keadilan (*equity*) dalam harus benar beban dari tarif pajak dan kewajiban membayar harus jela dan adil.
3. Memiliki daya guna ekonomi (*economic efficiency*) pajak yang hendaknya bisa mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
4. Kemampuan dalam melaksanakan suatu pajak (*ability to implement*) dimaksudkan pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah dalam mengumpulkan dana (*suitability as a local revenue source*) yang berarti harus jelas kepada daerah

mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak harus sama dengan tempat akhir beban pajak.

2.1.8 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak (Mardiasmo 2016:11):

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisan penghasilan kena pajak	Tariff pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%

Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.9 Pajak Daerah

Bedasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Soemitro dalam Pudyatmoko (2009: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam undang-undang no. 28 tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

Pajak-pajak yang termasuk pajak provinsi:

- a. Pajak kendaraan bermotor,
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor,
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
- d. Pajak air permukaan, dan
- e. Pajak rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak-pajak yang termasuk pajak kabupaten/kota:

- a. Pajak hotel,
- b. Pajak restoran,
- c. Pajak hiburan,
- d. Pajak reklame,
- e. Pajak penerang jalan,
- f. Pajak mineral bukan logam dan bukan batuan,
- g. Pajak parkir,
- h. Pajak air tanah,

- i. Pajak sarang burung wallet,
- j. Pajak bumi dan bangunan desa dan perkotaan, dan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.10 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.1.10.1 Pengertian PKB

Undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.1.10.2 Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *gross tonnage*).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

2.1.10.3 Dasar Perhitungan dan Tarif PKB

1. Perhitungan PKB

Besarnya PKB dapat dihitung dengan rumus berikut ini (Darwin 2010 : 108).

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{dasar pengenaan}$$

Rumus 2.1 Perhitungan PKB

Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok:

- a) Nilai jual kendaraan bermotor
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2. Tarif PKB

Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu :

- a) Tarif kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan yang paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b) Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
 - c) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.1.11 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.1.11.1 Pengertian BBNKB

Marihot dalam jurnal Mokoginta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

2.1.11.2 Objek BBNKB

Objek BBNKB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penyerahan hak milik dan/atau penguasaan kendaraan bermotor akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, pemasukkan dari luar negeri untuk dipakai, keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, pemasukkan ke badan usaha, dan penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 (dua belas) bulan.

1. Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
2. Azas pungutan BBNKB dipungut berdasarkan azas domisili (tempat tinggal subjek BBNKB).
3. Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri.
4. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

2.1.12 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jika membahas tentang pajak daerah erat kaitannya dengan PAD dimana pajak dan retribusi daerah memang merupakan sumber PAD yang memberikan kontribusi paling besar dalam proses pembangunan dan pembiayaan rumah tangga suatu daerah.

Menurut Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004), Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan
Yang termasuk dalam dana perimbangan yaitu:
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan yang sah
Yaitu dana hibah, Dana Penyesuaian, Dana Penyeimbang dari Pemerintah dan Bantuan Bencana Alam.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai PKB, BBNKB dan PAD sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama yang menjadi tinjauan penulis dalam menulis skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eryandi dkk (2011) dalam Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan (JEPP) “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui effectiveness pengenaan pajak kendaraan dan dijual kembali pajak di Provinsi Bengkulu, 2) untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan PAD di Provinsi Bengkulu, dan 3) untuk mengetahui faktor-faktor ancaman untuk meningkatkan dari PAD di kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertama, pengumpulan pajak dan penjualan kembali kendaraan kendaraan pajak kendaraan bermotor di provinsi Bengkulu pada tingkat yang buruk. Kedua strategi pengumpulan pajak kendaraan dan pajak penjualan kembali kendaraan diprovinsi Bengkulu ketat sanksi dan diperbaiki dari sistem administrasi. Ketiga, faktor-faktor itu ancaman koleksi kendaraan dan pajak penjualan di provinsi Bengkulu adalah rendahnya sanksi dan lain-lain. Kontribusi yang diperoleh dalam penelitian eryandi adalah dalam hal teori. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan metode analisis data yaitu analisis deskriptif dan analisis SWOT, dan sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear, uji hipotesis dan analisis kontribusi.

Mokoginta (2014) dalam jurnal EMBA “Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009- 2013 provinsi Sulawesi utara hasilnya melebihi target dan termasuk dalam kategori yang sangat efektif. Kontribusi yang diperoleh dari penelitian Mokoginta terhadap penelitian ini adalah dalam hal pengertian PKB dan BBNKB. Perbedaannya adalah Mokoginta membahas tentang efektivitas prosedur pemungutan PKB dan BBNKB, sedangkan penelitian ini membahas tentang kontribusi PKB dan BBNKB.

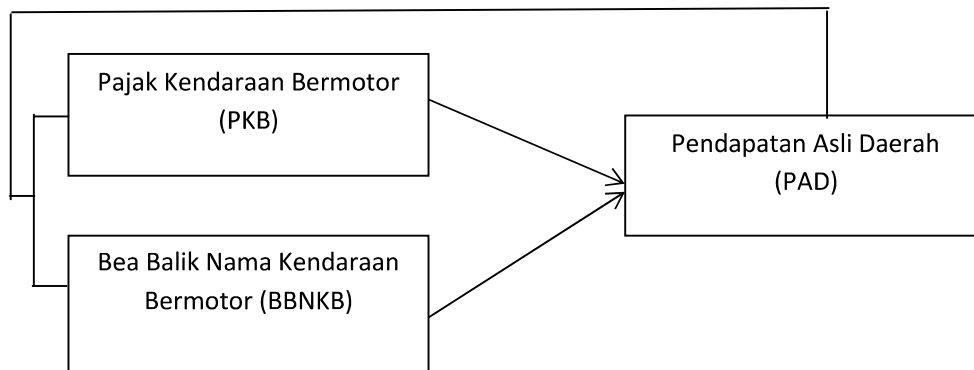
Ratnasari (2016) dalam Jurnal Progress Ekonomi Pembangunan “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara” dengan menggunakan metode eksplanatif yang menjelaskan sebab akibat antara variabel terikat dan variabel bebas. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data panel, yang dilaksanakan pada 12 kantor UPTD samsat se- Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel jumlah kendaraan bermotor, PDRB perkapita, mutasi kendaraan masuk, tunggakan pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kontribusi yang diperoleh dari penelitian Ratnasari adalah dalam hal teori pemungutan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya membahas tentang penerimaan PKB sedangkan penelitian ini membahas PKB, BBNKB dan PAD.

Anggraini dkk (2016) dalam jurnal IJCCS “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dab Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan” dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini Pajak Kendaraan Bemotor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012-2014. Kontribusi yang diperoleh dalam penelitian Anggarainidkk adalah dalam hal teori. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas pengaruh PKB, BBNKB terhadap PAD, sedangkan penelitian ini membahas kontribusi PKB, BBNKB.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini digunakan kerangka pemikiran teoritis dimana penelitian yang berjudul Pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD ditujukan untuk menganalisis besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010 sampai tahun 2015.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₁ = Terdapat Kontribusi yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

H₂ = Terdapat Kontribusi yang signifikan antara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

H_3 = Terdapat Kontribusi yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

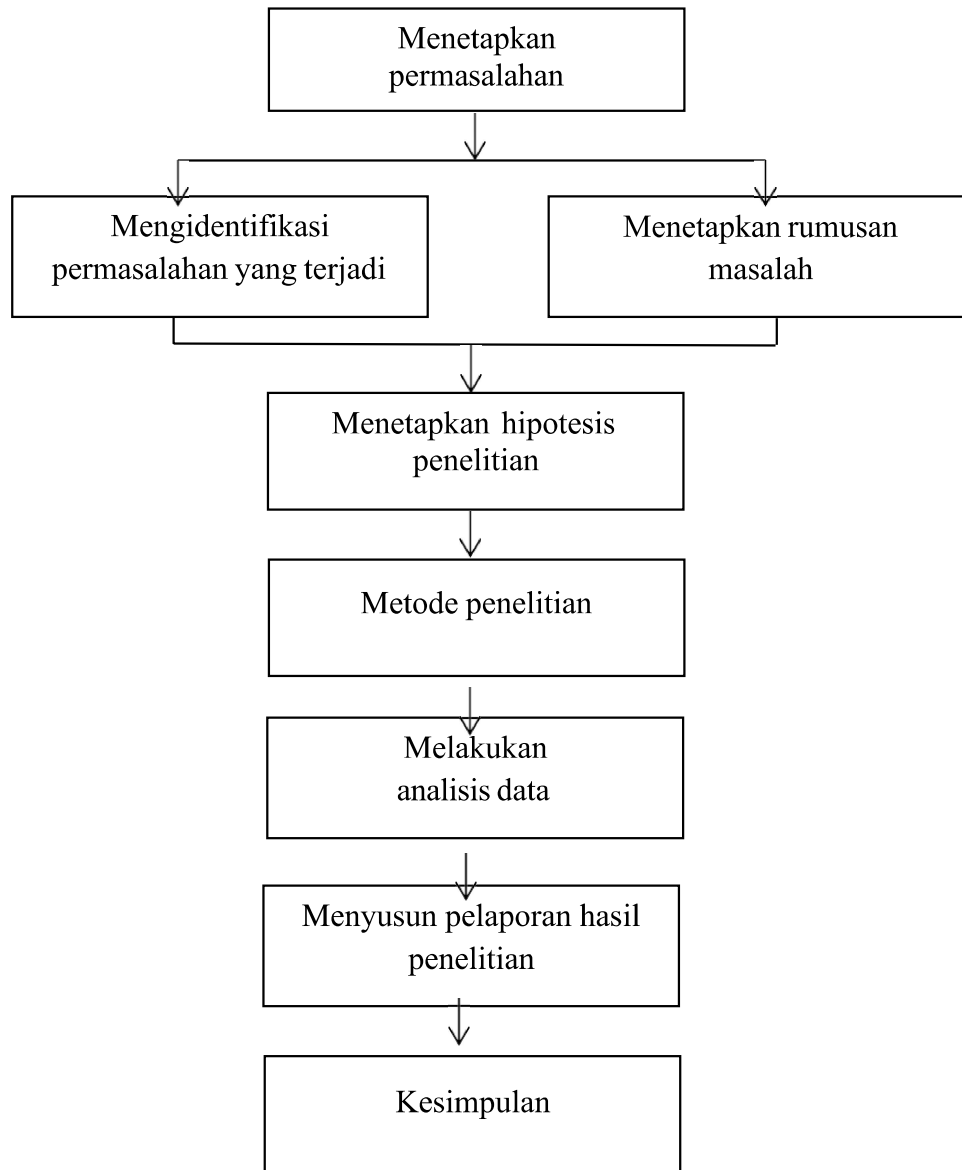
METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Atau adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Sujarweni 2015:49).

Sukardi (2004) desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini komponen desain dapat mencakup semua struktur penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil penelitian (dalam Sujarweni 2015:40).

Desain penelitian dalam penelitian ini diuraikan dalam bentuk skema penelitian dijelaskan dengan gambar berikut ini:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Operasional variabel

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2014 : 39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang secara murni berasal dari berbagai potensi daerah yang dapat dikelola atas keputusan pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

3.2.2 Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono 2014 : 39). Variabel independen dalam hal ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sedangkan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor. Objek BBNKB adalah penyerahan hak milik dan/atau penguasaan kendaraan bermotor akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, pemasukkan dari luar negeri untuk dipakai, keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, pemasukkan ke badan usaha, dan penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono 2016:117). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi PAD, PKB dan BBNKB yang ada di Kepulauan Riau dari tahun 2010 sampai 2015.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2013:91). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *sampling jenuh* atau teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono 2016 : 124). Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi PKB, BBNKB dan PAD Provinsi Kepulauan Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan jembatan yang menghubungkan peneliti dengan fenomena yang ditelitinya. Melalui metode yang dipilih, peneliti dapat mengumpulkan berbagai data yang diperlukan guna menjawab *research question* yang ada (Efferin dkk 2008:316). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian melalui sumber-sumber informasi berupa data maupun dokumen,

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2016 : 207).

3.5.2 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa kontribusi yang diberikan PKB dan BBNKB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau. Proses dilakukan dengan cara membandingkan realisasi PKB dan BBNKB dengan realisasi PAD.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar peranan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Perhitungan kontribusi dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi PKB dan BBNKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB Dan BBNKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear, data terlebih dahulu diuji layak untuk digunakan atau tidak, yaitu dengan menggunakan asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yaitu terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.5.3.1 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi ini adalah sebagai berikut:

- a. Nilai nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) pada model regresi. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah Nilai

$tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir. Misal nilai $tolerance = 0.10$ sama dengan tingkat kolinearitas 0.95 .

3.5.3.2 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi.

3.5.3.3 Uji Heterokedasitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heterokedasitas. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedasitas atau tidak terjadi heterokedasitas. Uji heterokedasitas dalam hal ini menggunakan grafik plot. Cara pengambilan keputusannya yaitu:

1. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu (gelombang, melebar kemudian menyempit), maka dikatakan terjadi heterokedasitas.

2. Apabila terdapat pola yang tidak jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dikatakan tidak terjadi heterokedasitas.

Selain menggunakan *scatterplot* dalam penelitian juga menggunakan uji park gleyser dengan mengorelasikan angka nilai absolute residualnya dengan masing-masing variable independen. Apabila hasil tersebut menunjukkan nilai probabilitasnya memiliki nilai signifikansi $>$ dari nilai alpha-nya (0,05), maka model tersebut dikatakan tidak mengalami heterokedasitas.

3.5.3.4 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2013:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan statistik. Analisis grafik bisa dilakukan dengan melihat grafik histogram dan dengan melihat normal probability plot. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Disamping uji grafik juga dilakukan uji statistik, dengan menggunakan uji statistik sederhana. Dan analisis statistik yang digunakan adalah uji *Kolmogrov-Smirnov*, jika nilai $asyimp.sig$ (2-tailed) $> \alpha$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk melihat atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dikarenakan analisis linear berganda ini memiliki dua bentuk hubungan yaitu secara parsial dan secara simultan maka pengujian juga dilakukan untuk menguji secara parsial dan simultan. Adapun persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut (Wibowo 2012:127):

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Rumus 3.1 Regresi Linear Berganda

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Nilai Konstanta

b = Nilai Koefisien Regresi

x_1 = Pajak Kendaraan Bermotor

x_2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

e = error

3.5.5 Uji Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai sesuatu hal yang masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis dapat diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi atau probabilitas, dan tingkat kepercayaan atau *confidence interval*. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

3.5.5.1 Uji Statistic t

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Mardiasmo 2016:97). Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam modelregresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen (Y). Rumus t hitung pada analisis regresi menurut Priyatno (2010: 68), adalah:

$$t \text{ hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Rumus 3.2. Uji t

Keterangan:

b_i = koefisien regresi variabel i

S_{b_i} = Standar error variabel i

Hasil uji t dapat dilihat pada output *Coefficients* dari hasil analisis regresi linier berganda di atas.

Langkah-langkah uji t sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis

Ho: Secara parsial tidak ada pengaruh antara sistem informasi pembelian dan gaya kepemimpinan dengan kelancaran proses produksi.

Ha: Secara parsial tidak ada pengaruh antara sistem informasi pembelian dan gaya kepemimpinan terhadap kelancaran proses produksi.

2. Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikan menggunakan 0,005 ($\alpha = 5\%$)

3. Menentukan t hitung

4. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2=2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k - 1$ (n adalah kasus dan k adalah jumlah variabel independen).

5. Kriteria pengujian

a. Ho diterima jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

b. Ho ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

6. Membandingkan t hitung dengan t tabel

7. Menarik kesimpulan

3.5.5.2 Uji Statistik F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Menurut Priyatno (2010: 67) untuk mencari F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

Rumus 3.3. Uji F

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data atau kasus

k = jumlah variabel independen

Hasil uji F dapat dilihat pada *output ANOVA* dari hasil analisis regresi linear berganda diatas. Tahap-tahaP untuk melakukan uji F, adalah:

1. Merumuskan Hipotesis

Ho: Tidak ada pengaruh antara Sistem Informasi Pembelian dan Gaya kepemimpinan secara bersama-sama terhadap kelancaran produksi.

Ha: Ada pengaruh antara Sistem Informasi Pembelian dan Gaya kepemimpinan secara bersama-sama terhadap kelancaran produksi.

2. Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikan menggunakan 0,005($\alpha = 5\%$).

3. Menentukan F hitung

4. Menentukan F tabel

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) atau $3-1= 2$, dan df 2 ($n-k-1$) (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen).

5. Kriteria pengujian

a. Ho diterima apabila $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$

b. Ho ditolak bila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$

6. Membandingkan F hitung dengan F tabel

7. Menarik kesimpulan

3.5.5.3 Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2013:97) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Dimana apabila nilai R^2 mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat dan erat antara

variabel dependen dan variabel independen dan penggunaan model tersebut dibenarkan.

Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen (Priyatno, 2010: 66).

Berikut perumusan penerapan koefisien determinasi dengan menggunakan 2 variabel bebas (independen) sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{(r_{yx_1})^2 + (r_{yx_2})^2 - 2(r_{yx_1})(r_{yx_2})(r_{x_1x_2})}{1 - (r_{x_1x_2})^2}$$

Rumus 3.4 Koefisien Determinasi

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinasi

r_{yx_1} = Korelasi Variabel X_1 (PKB) Dengan Y (Pendapatan Asli Daerah)

r_{yx_2} = Korelasi Variabel X_2 (BBNKB) Dengan Y (Penapatan Asli Daerah)

$r_{x_1x_2}$ = Korelasi Variabel X_1 (PKB) X_2 (BBNKB)

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kepulauan Riau. Lokasi ini dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 6 bulan dimulai dari bulan oktober 2016 sampai bulan oktober 2017 dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Tahap Penyusunan dan pengajuan judul						
2	Tahap Pengajuan proposal						

3	Tahap Perijinan penelitian						
4	Tahap Pengumpulan data						
5	Tahap Analisis data						
6	Tahap Penyusunan laporan						